

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim dan Hadist

Surat An-Nisa' Ayat 59

Hadist Shahih Muslim Nomor 2869

Sunan Tirmidzi Nomor 1306

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia nomor 23 tahun 2009

Surat edaran Nomor 050.1/8-32.15/1/2018 tentang pencegahan Penguasaan dan Pemilikan Tanah secara Absentee/Guntai

BUKU

Arie Sukanti Hutagalung, 2009 Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, (Jakarta: Rajawali Pers)

Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenada Media Group),

- Effendi Perangin, 2005, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: CV Rajawali.
- Sukarno Aburaera dkk, 2017 Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Kencana: Jakarta.
- Bertens, 1936, Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius: Yogyakarta.
- Muhammad Erwin, 2011 Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016 Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group.
- A Peter dan Koesriani Siswosebroto, 2010, Hukum Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosilogis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J Whelan, Jakarta: Sinar Harapan
- Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, Mengurai Teori Effectiveness of law Anthony Allot, Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional
- Ian Shapiro, 2006, Asas Moral Dalam Politik diterjemahkan oleh Thersia Wuryantari & Trisno Sutanto, Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute Jakarta.
- Sukarno Aburaera dkk, 2017, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Kencana: Jakarta.
- Friedmann, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Rajawali: Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2020, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah Teori Asas dan Filsafat Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Muhammad Erwin, 2011, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Isnai dan Anggreni A Lubis, 2022 Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Pustaka Prima: Medan.
- Boedi Harsono, 2003 Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria Djembatan: Jakarta.

- Diana R.W Napitupulu dan I Dewa Ayu Widyani, 2022, Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria, UKI: Jakarta.
- Rudi Indrajaya dkk, 2020, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama.
- Ansori Ahmad, 2010, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, Jakarta: Rajawali.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta: Kencana.
- Moch Isnaeni, 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan Surabaya: Revka Petra Media.
- Herlin Budiono, 2014, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Prajitno, 2013 Pengetahuan Praktis tentang apa dan siapa PPAT, Malang: Selaras.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020 Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta: Kencana.
- A.P Parlindungan, 2007, Pendaftaran Tanah Indonesia, Mandar Maju: Bandung.
- Boedi harsono, 2011 Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Penyusunan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Djambatan: Jakarta.
- Habib Adjie, 2017 Sanksi Perdata dan Administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik, Rafika Aditama: Surabaya.
- Husni Thamrin, 2013, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2011, merajit pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT (Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Indroharto, 2012, Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta: Kencana.

Wahidin dan Srimulyani, 2021, Statistik Sektoral Kabupaten Karawang 2021, Lismadona BR Pohan: Karawang.

Sukarno Aburaera dkk, 2017. Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Kencana: Jakarta.

Muhammad Erwin, 2011, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

JURNAL DAN TESIS

Dinalara Dermawati Butarbutar, “Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai”, Jurnal Pakuan Law Review volume 1 nomor 2, 2015,

Ariska Dewi, Peran Kantor Pertanahan dalam mengatasi kepemilikan tanah Absentee/Guntai di Kabupaten Banyumas, Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008,

Chita Herdiyanti, “Kepemilikan Tanah Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Volume 1 Nomor 1, 2017

Antony Allott, The Effectiveness of Law, Valpariso University Law Review Volumr 15 Number 2, Winter 1981,

Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis (Jurnal Hukum, Tema Utama Vol 7, 2008

Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Artikel Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2007

John Stuart Mill, On Liberty diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia Jakarta

Richo Wahyudi, Tesis Pembaruan Hukum Agraria Melalui Rancangan Undang-Undang Bidang Hukum Agraria dalam Program Legislasi Nasional 2010-2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Sri Winarsi, Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum, (Majalah Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 17 Nomor 2, Surabaya 2002) hal 186. Lihat juga dalam Gusti Surya Hadi Saputra, Batasan Waktu Sementara Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah Sementara, Jurnal Caplyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014

Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang, lihat juga buku Karawang dalam angka 2014 (Karawang in Figures 2014)

Iskandar Muda, Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

Chandra Yusuf dkk, Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP, Jurnal Imiah Global Education, Nomor 1 Volume 5, Maret 2024

M Ryan Bakry, Kemanfaatan Hukum “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah” Dalam Upaya “Peralihan Hak Tanah Ulayat” oleh “Anggota Masyarakat Adat” Daerah Pora Nusa Tenggara Timur, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Nomor 5 Volume 2, September 2022

Endang Purwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, Jurnal Hukum, Nomor 3 Volume 2, Desember 2011

INTERNET

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7069496/luas-dan-letak-wilayah-indonesia-berdasarkan-peta-yuk-simak#:~:text=Luas%20Wilayah%20Indonesia,-Indonesia%20adalah%20sebuah&text=Luas%20daratannya%20adalah%201.913.578,%2DModul%3A%20Geografi%20oleh%20Musliadi.>

<https://karawangkab.bps.go.id/indicator/53/49/1/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-karawang.html>

<https://www.antaranews.com/berita/3797715/dinas-137965-hektare-sawah-di-karawang-telah-panen-di-tahun->

[Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik hingga Materi Muatan \(detik.com\)](#)

[Badan Pertanahan Nasional \(BPN\): Pengertian, Tugas, dan Fungsinya \(rumah.com\)](#)

https://bandung.kompas.com/read/2022/12/14/213221678/karawang-penghasil-beras-terbesar-kedua-di-indonesia-wamentan-sebut-jangan#google_vignette

https://wartakota.tribunnews.com/2022/12/15/bupati-karawang-janji-jaga-lahan-pertanian-tak-tergiur-godaan-investor#google_vignette

WAWANCARA

Wawancara dengan pihak BPN Karawang pada tanggal 18 Maret 2024 Pukul 10:30 WIB, Narasumber yaitu Bapak Purnomo bagian Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT

Wawancara dengan Notaris PPAT Kabupaten Karawang Hanita Suryana, diambil pada tanggal 29 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Notaris PPAT Kabupaten Karawang Supri Harja Ali, diambil pada tanggal 29 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Pihak Pemilik Tanah Sawah Ibu Hajjah Eem, yang diambil pada 8 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Pihak Pemilik Tanah Sawah Ibu Hajjah Enok, yang diambil pada 9 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Pihak Pemilik Tanah Sawah Ibu Hajjah Asih, yang diambil pada 9 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB